

**EKSEKUSI PEMBAYARAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN)**

**DRAFT**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**M. ARIF**  
**NPM.1710012111036**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

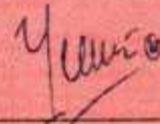
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg.: 56/PID-02/VII-2022

Nama : M. Arif  
Nomor : 1710012111036  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Eksekusi Pembayaran Pidana Denda dalam Tindak  
Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri  
Pariaman)

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juli** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



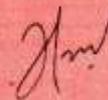
Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

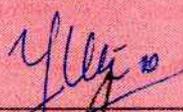
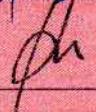
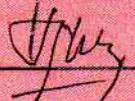
**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 56/PID-02/VII-2022**

Nama : M.Arif  
Nomor : 1710012111036  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **Eksekusi Pembayaran Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pariaman)**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** (Ketua) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum** (Anggota) 
3. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota) 



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**EKSEKUSI PEMBAYARAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN)**

M. Arif <sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani <sup>1</sup>,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [yarif0455@gmail.com](mailto:yarif0455@gmail.com)

**ABSTRAK**

Eksekusi pembayaran pidana denda dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh kejaksaan selaku eksekutor sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan, pada Tahun 2017 (FB) telah melakukan tindak pidana korupsi penyelewangan dana hibah bantuan sosial untuk (KONI) Kota Pariaman dan pengembalian kerugian uang negara melalui Kejari Pariaman sebesar Rp.521.467.950. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah eksekusi pidana denda dalam tindak pidana korupsi? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam eksekusi atas pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi? Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer dan, data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1), Eksekusi atas pengembalian kerugian keuangan negara dilakukan jaksa, dimana jaksa melakukan negosiasi dengan terpidana setelah keluarnya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa ialah terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara dan sulit menemukan harus uang hasil tindak pidana korupsi yang bersangkutan dengan banyak pihak.

**Kata kunci : eksekusi, pidana denda, tindak pidana korupsi.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Eksekusi .....	11
1. Pengertian Eksekusi .....	11
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Sekalu Eksekutor .....	14
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	14
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	16
C. Tinjauan tentang Kerugian Keuangan Negara .....	18

1. Pengertian Kerugian uang Negara .....	18
2. Pengembalian Kerugian uang Negara .....	19
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Eksekusi pembayaran Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi. ....	23
B. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Selaku Penuntut Umum Dalam Eksekusi Pembayaran Pidana Denda Dalam Tindak Pidana korupsi . . .	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	